

Program Pemberdayaan Guru

I G.A.K. Wardani

Abstract: Although there are many aspects responsible for the quality of education, teachers are usually considered as the most responsible ones for the low students' achievement. To help the teachers perform professionally, an empowerment program for teachers should be conducted. Based on the analysis on some aspects related to teachers, an empowerment program consisting of two components is developed. The first component, competency empowerment, proposes six ideas, i.e. improve the student recruitment system, improve teachers' reading ability and reading interest, presenting models, focus the training program on teachers' needs, encourage teachers to conduct classroom action research, and develop habit of scientific discussion. The second component, teachers' welfare empowerment, proposes reasonable incentive for teachers.

Kata-kata kunci: pemberdayaan guru, profesi guru, profil guru, kesejahteraan guru.

Mutu pendidikan yang sejak tahun 60-an menjadi salah satu masalah pokok pendidikan makin gencar dipertanyakan. Rendahnya mutu lulusan SD, SLTP, dan SMU banyak dibahas dalam berbagai diskusi. Hal ini terkait dengan rendahnya Nilai Ebtanas Murni (NEM) serta kurang mampunya para siswa bernalar dan berpikir kritis. Kemampuan para siswa lebih banyak terfokus pada menghafal fakta tanpa diimbangi dengan kemampuan mempertanyakan serta menerapkan teori dan menguasai keterampilan. Rendahnya kemampuan akademik ini diperparah oleh munculnya perilaku yang

I G.A.K. Wardani adalah dosen FKIP Universitas Terbuka. Artikel ini diangkat dari Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Terbuka XIV, 14 September 1998.

menjurus ke arah yang tidak diharapkan, seperti perkelahian pelajar dan penggunaan obat-obat terlarang. Penyebab keadaan ini sangat banyak, namun tudingan utama selalu ditujukan kepada guru karena gurulah yang merupakan ujung tombak di lapangan yang bertemu langsung dengan siswa secara teratur dan terprogram. Guru dianggap memegang posisi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang merupakan pencerminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, agar guru mampu menjalankan tugasnya secara profesional, salah satu usaha yang harus dilakukan adalah memberdayakan guru.

Pentingnya pemberdayaan guru telah sering diketengahkan, baik dalam pertemuan yang khusus mengkaji tentang berbagai masalah pendidikan, maupun melalui berbagai media massa. Buah pikiran yang telah diungkapkan tersebut perlu diramu menjadi satu program yang cukup operasional sehingga dapat dijadikan acuan dalam merealisasikan usaha pemberdayaan guru. Program pemberdayaan guru yang efektif haruslah didasarkan pada hasil kajian berbagai aspek yang berkaitan dengan guru, profil kemampuan dan kesejahteraan guru, serta sistem pendidikan dan pembinaan guru. Dengan mengkaji aspek-aspek itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang harus mendapat perhatian utama dalam program pemberdayaan.

Artikel ini menyajikan hasil kajian berbagai aspek tersebut, dan kemudian mengembangkan program pemberdayaan guru yang dianggap sesuai dengan kondisi guru saat ini. Diharapkan program pemberdayaan ini akan dapat menarik perhatian para pendidik dan pembina guru untuk kemudian dijadikan masukan dalam usaha pemberdayaan guru. Akhirnya artikel ini ditutup dengan menyajikan implikasi program pemberdayaan guru bagi personel dan lembaga yang terkait dengan pendidikan dan pembinaan guru.

ASPEK YANG TERKAIT DENGAN GURU

Berbagai aspek yang terkait dengan guru perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan program pemberdayaan guru. Dengan mengkaji aspek-aspek itu, kebutuhan utama guru dapat diidentifikasi sehingga program pemberdayaan yang dirancang tidak salah arah. Dengan demikian pengkajian ini merupakan analisis kebutuhan yang didasarkan pada situasi dan kondisi guru pada saat ini. Pengkajian atau analisis dilakukan melalui kajian pustaka, termasuk hasil penelitian, serta pengamatan langsung yang bersifat informal. Aspek yang dikaji mencakup hakikat profesi guru, profil kemampuan dan kesejahteraan guru, serta pendidikan dan pembinaan guru.

Hakikat Profesi Guru

Pada hakikatnya, pekerjaan guru dianggap sebagai pekerjaan mulia yang sangat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu sebenarnya yang boleh menjadi guru adalah orang-orang pilihan. Hal ini sesuai dengan hakikat pekerjaan guru sebagai pekerja profesional, yang menurut Darling-Harmond & Goodwin (1993) paling tidak memiliki tiga ciri utama, yaitu: (1) penerapan ilmu dalam pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus; (2) pekerjaan profesional memiliki mekanisme internal yang terstruktur, yang mengatur rekrutmen, pelatihan, pemberian lisensi (ijin kerja), dan ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai; (3) kaum profesional memiliki tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya.

Di samping ketiga ciri pekerjaan profesional yang telah diungkapkan, perlu dicatat bahwa keprofesionalan seseorang bukan merupakan dikotomi, tetapi merupakan satu kontinum atau rentangan dari pemula (*novice*) sampai kepada pakar (*expert*). Oleh karena itu, seorang guru selalu meniti karir dari *entry*, *mentor*, sampai ke *master teacher* (Riel, 1998). Dikaitkan dengan surat keputusan Menpan No. 26/1989, guru dapat meniti karir mulai dari guru pratama sampai guru utama. Dari segi penyiapan guru, program pendidikan guru paling tidak harus sama dengan program penyiapan profesi lain seperti sekolah kedokteran yang memberikan kesempatan menimba pendidikan umum yang menantang, pengetahuan bidang studi yang mendasari praktik, kesempatan untuk menghayati latihan yang efektif untuk memangku jabatan, serta kesempatan untuk mengembangkan wawasan/filosofi profesinya.

Profesionalisme ditandai oleh dua pilar utama, yaitu layanan ahli yang aman yang menjamin kemaslahatan klien, serta pengakuan dan penghargaan dari masyarakat (Joni, 1989; Konsorsium Ilmu Pendidikan, 1993). Pilar pertama layanan ahli harus mampu ditunjukkan secara meyakinkan sehingga masyarakat merasa aman menerima layanan itu. Di pihak lain, pengakuan dan penghargaan dari masyarakat terhadap satu profesi akan memperkuat keterandalan profesi. Dengan demikian terdapat hubungan timbal balik antara keterandalan layanan dengan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Makin andal layanan ahli yang diberikan dan makin tinggi rasa aman yang dirasakan penerima layanan, makin tinggi pula pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Layanan ahli yang diberikan haruslah didasarkan pada penguasaan bidang ilmu yang diakui sebagai landasan profesi.

Bertitik tolak dari ciri profesionalisme seperti yang diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa guru yang ahli bukan seorang teknisi, tetapi seorang profesional yang layak dan mampu mengambil keputusan serta membuat rencana yang didasarkan pada pengetahuan atau ilmu yang disesuaikan dengan situasi, siswa, wawasannya sendiri, nilai, serta komitmennya (Zumwalt, 1989). Dengan perkataan lain, seorang guru profesional harus mampu mengambil keputusan situasional dan transaksional (Joni, 1989). Keputusan situasional diambil guru ketika merancang pembelajaran, sedangkan keputusan transaksional diambil ketika pembelajaran sedang berlangsung.

Dari segi pengakuan dan penghargaan masyarakat dan pemerintah, keputusan Menpan No. 26/1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru merupakan pengukuhan jabatan guru sebagai jabatan profesional. Dengan dikeluarkannya keputusan itu, jabatan guru diakui sebagai jabatan fungsional yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pendidikan di sekolah. Bidang jabatan guru dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan, pengembangan profesi dan penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan.

Profil Kemampuan dan Kesejahteraan Guru

Kajian tentang profil guru mencakup jumlah, latar belakang pendidikan, kemampuan, dan kesejahteraan guru. Statistik persekolahan 1996/1997 (Minister of Education and Culture, 1998) menunjukkan bahwa secara nasional jumlah guru cukup memadai (guru SD: 1.327.128 orang; guru SLTP: 430.981 orang; SM: 337.796 orang). Namun, dari segi penyebarannya keberadaan guru di berbagai daerah tidak proporsional, sebagaimana yang ditemukan dalam studi kebijakan tentang pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan pembinaan guru sekolah dasar (Setijadi, 1992). Karena sebaran yang tidak merata, terjadi kekurangan guru di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, sebagaimana terungkap dalam pertemuan Mendikbud, Yuwono Sudarsono, dengan para guru dari 27 propinsi (Republika, 19 Agustus 1998).

Dari segi latar belakang pendidikan, statistik persekolahan menunjukkan bahwa pendidikan terendah guru SD adalah SLTP (74.544 orang), sedangkan yang tertinggi adalah sarjana (45.160 orang). Sebagian besar guru SD masih berpendidikan setingkat SM (SPG), sedangkan yang berpendidikan Diploma II sampai saat ini lebih dari 200 ribu orang. Pada

jenjang SLTP dan SM, sudah ada guru yang berpendidikan master/magister (212 orang guru SLTP dan 698 orang guru SM).

Jumlah dan latar belakang pendidikan guru yang cukup menggemirakan tampaknya tidak seiring dengan citra tentang kemampuan guru. Layanan ahli yang diharapkan dari seorang guru profesional belum sepenuhnya dapat diberikan oleh guru. Berbagai hasil penelitian (Jiono, 1992; Nielson dkk., 1996; Nasoetion, 1996) menunjukkan bahwa kinerja guru masih belum sesuai dengan harapan. Penguasaan materi ajaran yang dibawah standar, pengelolaan proses belajar mengajar yang masih didominasi guru, kurangnya kemampuan dan kesadaran guru untuk memfasilitasi interaksi dan menumbuhkan dampak pengiring, menyebabkan siswa lebih banyak bergulat dengan bahan hafalan daripada mempertanyakan sesuatu. Profil kemampuan seperti itu menyebabkan citra guru makin memudar, yang berdampak pada sikap siswa dan masyarakat terhadap guru. Sebagai akibatnya, pekerjaan sebagai guru tidak lagi dianggap sebagai pilihan utama, tetapi pilihan terakhir. Kondisi ini akan makin memperparah citra guru karena calon guru tidak dapat dipilih dari putra-putri terbaik bangsa.

Dilihat dari kesejahteraan, setiap orang Indonesia tentu sepakat bahwa kesejahteraan guru masih jauh dari memadai. Gaji guru yang relatif kecil masih kerap dipotong untuk memenuhi berbagai kewajiban. Tunjangan fungsional yang diterima guru yang sebenarnya merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru hampir tidak ada artinya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika guru mencari pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai akibatnya, guru tidak mampu memfokuskan perhatian pada tugas utamanya sebagai guru. Pekerjaan sambilan kadang-kadang lebih menyita waktu daripada tugas utama. Dampak lebih jauh terhadap kondisi ini dapat dibayangkan, citra guru makin menurun.

Pendidikan dan Pembinaan Guru

Pendidikan atau pengadaan guru yang semula ditangani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) secara bertahap mulai tahun akademik 1990/1991 menjadi tanggung jawab Ditjen Dikti. Kebijakan ini terkait dengan usaha untuk meningkatkan kualifikasi guru yang diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Tugas pengadaan ini diberikan kepada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang mendidik guru SD sampai dengan guru SM.

Berbagai usaha telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan, di antaranya memperbaiki kurikulum berdasarkan berbagai masukan dari lapangan, meningkatkan kemampuan para guru, baik melalui pelatihan jangka pendek maupun pelatihan jangka panjang menuju kepada peningkatan kualifikasi, serta pengadaan sarana dan fasilitas pendidikan. Namun, dari sisi rekrutmen calon guru, usaha perbaikan ini tampaknya belum terwujud. Terbatasnya lulusan SM yang ingin menjadi guru membuat pilihan menjadi terbatas sehingga calon guru yang diterima sebagian besar bukan putra-putri terbaik. Keadaan ini lebih diperparah lagi dengan tumbuhnya sejumlah LPTK swasta yang kualitas pendidikannya belum diketahui. LPTK swasta ini menerima calon guru yang gagal masuk ke LPTK negeri. Dari kondisi ini dapat dibayangkan kualitas lulusan yang dihasilkan dan kemudian akan bertugas sebagai guru di berbagai daerah.

Pembinaan guru juga telah banyak dilakukan, baik melalui pendidikan formal yang menuju kepada peningkatan kualifikasi maupun pelatihan jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru. Di samping itu, sistem pembinaan guru secara rutin juga telah ditata. Guru dibina oleh kepala sekolah bersama penilik/pengawas. Namun, para penilik dan pengawas tidak sepenuhnya dapat melakukan tugasnya secara mantap karena latar belakang pendidikan/pengalaman yang tidak mendukung. Akibatnya, pembinaan yang dilakukan lebih bersifat administratif daripada akademik. Dalam hal pelatihan atau penataran guru, juga sudah banyak yang dilakukan sejak awal tahun 70-an. Penataran yang dilakukan oleh Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar (P3D) serta Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) telah banyak menghasilkan gagasan inovatif. Sayangnya, gagasan itu seolah-olah terhenti hanya pada generasi yang menerimanya sehingga dampak penularan yang direncanakan tidak terjadi sebagaimana mestinya. Di samping itu tidak adanya koordinasi antarproyek menyebabkan gagasan yang dikembangkan dalam suatu proyek berhenti ketika proyek itu berakhir (Nasoetion, 1998). Situasi ini diperparah oleh adanya tumpang tindih antara berbagai penataran yang diselenggarakan akhir-akhir ini. Tidak jarang satu lembaga mengadakan kegiatan penataran tanpa koordinasi dengan lembaga lain sehingga guru yang sama menerima penataran yang berbeda tentang materi yang sama. Selain itu, program penataran yang disusun (sering secara tergesa-gesa), hampir tidak banyak menyentuh jantung pembelajaran, yaitu interaksi guru dan siswa di dalam kelas. Program

Pemantapan Kerja Guru (PKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang pernah dianggap sangat berhasil juga tidak banyak menyentuh masalah utama guru, yaitu bagaimana membuat siswa mau dan mampu belajar. Tampaknya kesadaran bahwa belajar hanya terjadi jika yang belajar (siswa) aktif terlibat secara intelektual-emosional belum mendasari penyusunan program penataran ini.

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Berdasarkan hasil kajian ketiga aspek pendidikan di atas, tampaknya cukup jelas bahwa program pemberdayaan guru harus diarahkan kepada upaya yang memungkinkan guru mampu memberikan layanan ahli yang andal serta mendapat pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Kemampuan yang mantap akan membuat guru mampu melaksanakan tugas secara profesional, memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta mampu mencari alternatif pemecahan jika menghadapi masalah sehingga dia benar-benar merasa memiliki wewenang sebagai guru. Wewenang itu akan sangat berarti bagi guru dan dapat mendorong guru untuk melakukan yang terbaik bagi anak didiknya jika imbalan yang dia terima sebagai wujud pengakuan dan penghargaan masyarakat cukup "membetahkan". Oleh karena itu, program pemberdayaan guru harus mencakup aspek kemampuan dan kesejahteraan guru.

Dari segi peningkatan kemampuan, program pemberdayaan dapat dilakukan pada tingkatan pendidikan prajabatan (*pre-service*) dan pada tingkat pendidikan dalam jabatan (*in-service*). Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa hal perlu mendapat perhatian, yaitu kualitas calon guru, penguasaan materi ajaran, kemampuan melaksanakan interaksi belajar-mengajar, serta wawasan guru sebagai pekerja profesional.

Perbaikan Sistem Rekrutmen

Berdasarkan kenyataan bahwa calon mahasiswa yang mendaftar ke LPTK sebagian besar bukan putra-putri terbaik bangsa, sistem rekrutmen yang dilakukan hanya berdasarkan UMPTN perlu ditingkatkan dengan ujian masuk yang lebih komprehensif. Calon mahasiswa yang akan menjadi guru harus disaring melalui ujian penampilan serta minat untuk menjadi guru. Dengan cara ini dapat diyakinkan bahwa calon guru yang terpilih

memiliki modal minat dan kemauan serta penampilan yang sesuai untuk seorang guru. Kemauan dan minat yang tinggi dapat mendorong seseorang untuk mencapai sesuatu. Oleh karena itu, perlu dikembangkan tes minat dan penampilan yang mampu memprediksi minat dan kemauan calon mahasiswa untuk menjadi guru.

Peningkatan Kemampuan dan Minat Membaca

Kemampuan membaca merupakan modal dasar dalam menguasai ilmu dan teknologi. Oleh Mendikbud, Yuwono Sudarsono, membaca dikategorikan sebagai kompetensi pertama pendidikan dan kebudayaan (Kompas, 24 Agustus 1998). Pengamatan secara informal serta hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap Program Penyetaraan D II Guru SD (Wardani dkk., 1995; Udin, 1998) menunjukkan bahwa kemampuan membaca para guru SD masih terbatas. Ini terbukti dari banyaknya konsep yang tidak dapat ditangkap secara benar oleh para guru, dan guru cenderung meminta tutor menceramahkan materi modul yang semestinya sudah dibaca oleh para guru yang menjadi mahasiswa ini.

Untuk meningkatkan kemampuan dan minat membaca, para dosen pada pendidikan prajabatan dapat menugasi mahasiswa secara teratur membuat laporan tentang artikel atau buku yang berkaitan dengan materi matakuliah, terutama matakuliah yang berkaitan dengan materi ajaran di sekolah. Dalam hal ini perpustakaan harus dilengkapi dengan buku-buku sekolah serta jurnal yang relevan. Sejalan dengan yang dilakukan bagi calon guru, para tutor program penyetaraan dapat mengisyaratkan mahasiswa membaca modul yang disertai dengan tugas lanjutan seperti mengidentifikasi istilah atau kata yang dianggap sukar, memecahkan masalah yang hanya dapat dilakukan setelah membaca modul, atau tugas lain yang menantang.

Bagi para guru yang tidak mengikuti pendidikan formal, peningkatan kemampuan dan minat membaca dapat dilakukan dengan menerbitkan majalah atau jurnal. Guru diminta untuk menulis dalam jurnal itu atau memberi komentar terhadap artikel yang dimuat. Usaha ini sudah sering dilakukan, namun kesinambungannya sering tidak terpelihara. PGRI sebagai organisasi profesi memiliki peran penting dalam merealisasikan usaha ini. Penanganan majalah dapat ditugaskan kepada guru yang memiliki kemampuan dan minat yang besar, dan insentif diberikan berupa angka kredit yang dapat dijadikan dasar untuk kenaikan jabatan.

Penyajian Model

Belajar dari model atau peragaan langsung merupakan cara yang cukup efektif, lebih-lebih dalam menguasai kemampuan yang berada dalam ranah keterampilan dan sikap. Cara ini tidak terbatas pada anak-anak, tetapi juga berlaku bagi orang dewasa. Mengelola pembelajaran menuntut berbagai keterampilan yang harus ditampilkan oleh guru ketika mengajar. Berbagai model mengajar atau strategi mengajar, terutama yang mampu membuat siswa belajar dan menumbuhkan dampak pengiring, perlu dimodelkan oleh para dosen pendidik guru, tutor dan penatar. Hubungan kolegial yang akrab, yang saling menghargai karena didasarkan pada rasa saling membutuhkan bantuan profesional, dapat dikembangkan oleh guru jika dosen, tutor dan penatar mampu memodelkannya di antara mereka.

Karena keterampilan hanya dapat dikuasai melalui latihan dan pembentukan sikap hanya dapat dikuasai melalui penghayatan, maka setelah calon guru mengamati model dan mendiskusikan hasil pengamatannya mereka harus diberi kesempatan berlatih atau menghayati satu situasi secara memadai. Di samping itu, para dosen, tutor dan penatar haruslah mampu menjadi model guru yang profesional. Artinya, mereka harus mampu menampilkan diri dengan berbagai peran, kadang-kadang sebagai sumber informasi, kadang-kadang sebagai fasilitator, atau suatu ketika sebagai guru yang mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar yang baik, termasuk memelihara hubungan antarpribadi yang akrab dan sehat dengan siswa.

Fokus Program Penataran pada Kebutuhan Guru

Untuk memberdayakan guru, program penataran harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan guru, yang dapat diidentifikasi dengan mengkaji berbagai penelitian yang pernah dilakukan atau melalui pengamatan informal. Hasil penelitian dan pengamatan informal menunjukkan bahwa kebutuhan guru terutama terletak pada dua aspek, yaitu penguasaan materi ajaran dan pengelolaan interaksi kelas. Oleh karena itu, program penataran harus difokuskan pada kedua aspek tersebut di samping program titipan yang sering tidak dapat dihindari.

Pendalaman materi ajaran dapat dilakukan dengan memberikan informasi tambahan yang diikuti dengan diskusi yang intensif, yang memungkinkan para guru menguasai materi secara konseptual dan bukan

sekadar menghafal materi itu. Dalam kaitan ini, kemampuan membaca memegang peranan penting. Tugas membaca dalam pendalaman materi perlu diberikan selama penataran berlangsung, dengan tagihan yang jelas setelah para guru selesai membaca. Tagihan ini hendaknya benar-benar menantang guru untuk membaca dan dapat membedakan guru yang memang membaca dengan guru yang hanya meniru pekerjaan teman. Hal ini kelihatannya mudah dilakukan tetapi memerlukan keseriusan yang tinggi dalam pelaksanaannya.

Aspek kedua adalah pengelolaan interaksi kelas, memfokuskan perhatian pada "belajar siswa". Pertanyaan mendasar dalam kaitan ini adalah: apa yang semestinya dilakukan oleh guru agar siswa mau dan mampu belajar? Inilah sebenarnya yang merupakan jantung pembelajaran. Menyajikan model, mengajak guru mendiskusikan model dan kemudian memberikan kesempatan berlatih yang memadai merupakan satu cara yang dapat ditempuh. Latihan diikuti oleh diskusi yang difokuskan pada kemampuan guru menemukan kekuatan dan kelemahannya ketika menjalani latihan, dan kemudian memikirkan cara memperbaiki kelemahan pada latihan berikutnya. Dengan demikian latihan harus diimbangi dengan bimbingan yang intensif sehingga tingkat penguasaan guru dapat diidentifikasi. Oleh karena itu perlu ada perubahan dalam sistem penataran. Sertifikat penataran yang diberikan kepada peserta haruslah menggambarkan prestasi peserta selama mengikuti penataran. Artinya, sertifikat yang diberikan bukan berupa keterangan telah mengikuti penataran (*certificate of attendance*), tetapi keterangan tentang tingkat penguasaan (*certificate of mastery*).

Penggalakan Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang mulai digalakkan dalam lembaga pendidikan guru tampaknya merupakan sesuatu yang menjanjikan dalam memberdayakan guru. PTK yang dilakukan oleh guru di dalam kelas bertujuan untuk memperbaiki praktik pendidikan/pembelajaran yang dilakukan guru serta meningkatkan pemahaman guru terhadap praktik itu (Hopkins, 1993; McNiff, 1992). Berbeda dengan praktik pembelajaran sehari-hari yang dilakukan oleh guru, PTK mendorong guru untuk mengenal/menyadari masalah yang dihadapinya dan kemudian merencanakan upaya untuk memperbaikinya. Upaya perbaikan dilakukan melalui tindakan berulang yang secara eksplisit dan sistematis mengacu kepada kaidah-kaidah

penelitian (Joni, 1998). Inilah yang mencirikan PTK sebagai *systematic inquiry made public*.

PTK yang diarahkan dan dikerjakan secara benar akan mampu mendorong guru terlibat secara aktif dalam memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Di samping itu, PTK mendorong guru menempatkan diri sebagai peneliti di kelasnya sendiri. Kondisi ini akan memungkinkan guru memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri secara profesional melalui studi terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, kemampuan untuk melaksanakan PTK perlu digalakkan tidak saja untuk calon guru, tetapi juga bagi para guru yang sudah bertugas di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program penataran guru.

Pembudayaan Diskusi Ilmiah

Selama ini tampaknya diskusi atau pertemuan ilmiah merupakan monopoli kalangan perguruan tinggi. Kalau pekerjaan guru memang diakui sebagai pekerjaan profesional, mestinya guru juga mampu dan mau melakukan diskusi atau pertemuan ilmiah. Pertemuan ini dapat diselenggarakan secara periodik di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi. Pertemuan dapat diisi dengan bahasan perluasan wawasan untuk pengembangan profesi dan dapat pula diisi dengan presentasi laporan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru. Untuk perluasan wawasan dapat diundang berbagai pakar bidang studi atau pakar pendidikan; namun, bagian terbesar dari pertemuan ini hendaknya diisi oleh guru sendiri. Jika cara ini dilakukan secara teratur, kemampuan dan kepercayaan diri guru akan menjadi semakin mantap, sejalan dengan adanya kesempatan yang relevan untuk mendapatkan kredit kenaikan jabatan.

Di samping gagasan yang telah diuraikan di atas, masih banyak usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan guru. Dari sisi pendidikan prajabatan, masih ada satu sisi yang perlu ditangani, yaitu keakraban dengan lapangan. Para pendidik guru dan calon guru haruslah mengenal secara akrab sekolah yang akan menjadi tempat tugasnya. Gagasan pengakraban lapangan ini sudah lama dilontarkan tetapi sampai kini realisasi gagasan menugaskan dosen pendidik guru untuk mengajar di sekolah secara periodik belum terwujud. Oleh karena itu, gagasan ini perlu dibangkitkan kembali sehingga para pengambil kebijakan dapat merancang realisasinya. Untuk mengakrabkan calon guru dengan lapangan sudah banyak yang dilakukan oleh LPTK, seperti menugaskan mahasiswa melakukan kunjungan

ke sekolah sejak dini dan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Semua kegiatan ini perlu ditingkatkan intensitas dan kesinambungannya agar para calon guru benar-benar mengenal lapangan tugasnya sebelum tamat dari lembaga pendidikan guru.

Peningkatan Kesejahteraan Guru

Pemberdayaan guru dari segi kemampuan tidak akan banyak membantu jika kesejahteraan guru tidak mendapat perhatian. Oleh karena itu, sudah saatnya kesejahteraan guru mendapat prioritas dalam anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sehingga layanan ahli yang diberikan oleh para guru mendapat imbalan yang "membetahkan". Meninjau ulang tunjangan fungsional guru barangkali merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini memang menimbulkan masalah pendanaan yang cukup besar, lebih-lebih dalam situasi krisis ekonomi. Jika hal ini tidak dilakukan, mutu pendidikan yang dicita-citakan mungkin akan tetap merupakan angan-angan. Dalam jangka panjang, dampak ini akan sangat mengenaskan berupa merosotnya kualitas sumber daya manusia.

PENUTUP

Program pemberdayaan guru tidak mungkin berhasil jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan dan pembinaan guru. Dukungan dari para kepala sekolah, penilik dan pengawas terutama dalam pembinaan guru sangat diperlukan. Oleh karena itu, para kepala sekolah, penilik, dan pengawas harus terlibat secara aktif dalam program pemberdayaan guru. Dengan cara ini, guru akan mendapat dukungan dari dua sisi, yaitu persetujuan atau restu atas kegiatan yang dilakukan dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Di samping itu, program pemberdayaan guru tidak hanya memberdayakan guru, tetapi juga memberdayakan kepala sekolah, penilik dan pengawas. Selanjutnya koordinasi antarlembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan terutama dalam penyusunan program dan rekrutmen serta latihan. Dengan cara ini, tumpang tindih dan kebingungan para guru dapat dihilangkan, dan program pemberdayaan guru tidak dicemari oleh kesalahan koordinasi.

Bagi lembaga pendidikan guru, baik yang mengelola program prajabatan maupun yang mengelola program penyetaraan, program pember-

dayaan guru harus dipandang sebagai sesuatu yang terintegrasi dengan program pendidikan guru sendiri. Artinya, program pendidikan guru harus mencakup butir-butir yang memungkinkan para calon guru tumbuh menjadi manusia yang mampu memberdayakan diri sendiri sehingga kegiatan pemberdayaan guru yang ditemukan di lapangan bukan merupakan sesuatu yang asing. Untuk melaksanakan hal ini, para pengembang dan pelaksana program haruslah bekerjasama dan memanfaatkan semua sumber daya termasuk sarana dan fasilitas yang sudah ada.

Khusus untuk program penyetaraan yang diselenggarakan dengan sistem belajar jarak jauh (SBJJ), kerja sama ini harus dilakukan secara lebih berkualitas, tidak hanya dengan para pengelola teknis, tetapi juga dengan lembaga yang memiliki sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Dengan kata lain, masing-masing pihak harus menyadari bahwa komponen yang menjadi tanggung jawabnya memberikan sumbangan yang sama kepada keberhasilan program. Oleh karena itu, pembagian tugas dan tanggung jawab ini haruslah disepakati bersama, dan kesepakatan ini benar-benar merupakan rujukan dalam pelaksanaan program. Inilah yang merupakan pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan jika pemberdayaan guru benar-benar menjadi kepedulian lembaga pendidikan guru.

DAFTAR RUJUKAN

- Darling-Hammond, L., dan Goodwin, A.L. 1993. *Progress Toward Professionalism in Teaching*. Dalam Cawelti, G. (Ed.). *Challenges and Achievements of American Education, The 1993 ASCD Year Book*. Alexandria: ASCD.
- Hopkins, D. 1993. *A Teacher's Guide to Classroom Research*. Buckingham: Open University Press.
- Jiono. 1992. *Kemampuan Pemahaman Guru tentang IPA dan Sarana Pelajaran IPA di SMP*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Jakarta: Balitbang-Dikbud.
- Joni, T.R. 1989. *Mereka Masa Depan, Sekarang: Tantangan bagi Pendidikan dalam Menyongsong Abad Informasi*. Disampaikan pada Upacara Dies Natalis XXXV, Lustrum VII IKIP MALANG, 18 Oktober 1989.
- Joni, T. R. 1998. *Hasil Telaah 6 Usulan PTK PPGSD*. Makalah disiapkan untuk pertemuan PTK di Yogyakarta, 5 Januari 1998.
- MacNiff, J. 1992. *Action Research: Principles and Practice*. London: Routledge.
- Nasoetion, S. 1996. *Laporan Pendidikan IPA dan Teknologi di SMP*. Naskah disajikan pada Seminar Dies Natalis UT, 28 Agustus 1996.
- Nielson, D., Somerset, A., Mahadi, R., dan Wardani, I G.A.K. 1996. *Strengthening Teacher Competency and Student Learning*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

- Riel, M. 1998. Teaching and Learning in The Educational Communities of The Future. Dalam Dede, C. (Ed.). *ASCD Year Book 1998*. Alexandria: ASCD.
- Udin, S.W. 1998. *Keterlaksanaan Kurikulum Baru Program Penyetaraan D II PGSD Melalui Sistem Belajar Jarak Jauh*. Jakarta: FKIP Universitas Terbuka.
- Wardani, I G.A.K. 1995. *Laporan Hasil Pemantauan Program Penyetaraan D II Guru Kelas Swadana*. Jakarta: FKIP Universitas Terbuka.
- Zumwalt, K. 1989. Beginning Profesional Teachers: The Need for A Curricular Vision of Teaching. Dalam Reynolds, M.C. (Ed.). *Knowledge Base for The Beginning Teachers*. New York: Pergamon Press.